

**STRATEGI INDONESIA MENGATASI TUMPANG TINDIH ZEE
INDONESIA-VIETNAM DI PERAIRAN NATUNA UTARA
TAHUN 2017-2019**

Oleh: Ratna Junita

Ratna.junita4891@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Bibliografi: 13 Buku, 26 Jurnal, 32 Dokumen Resmi, 92 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 07561-63277

ABSTRACT

This study discusses the problem of overlapping claims of the Exclusive Economic Zone (EEZ) between Indonesia and Vietnam in North Natuna Waters in 2017-2019. Indonesia's vast sea area allows for border disputes with neighboring countries, especially if the country's maritime boundaries have not been resolved. In addition to causing disputes, it also raises other problems such as illegal fishing violations in the jurisdiction and ownership of Indonesia.

In discussing the various overlapping EEZs, the authors use qualitative research methods, with data collection techniques based on library research derived from literary sources such as books, journals, official documents, and scientific articles. The perspective that the author uses is the Realism Perspective, which always prioritizes the interests of the state in making any policy. This study uses Border Dispute Theory which relates values and other problems that expand the boundary problem.

This study shows that in an insignificant negotiation between the two countries, the difference in views between the EEZ regime and the Continental Shelf, causing the results of the negotiations between Indonesia and Vietnam to be not very favorable for Indonesia. The problem of overlapping EEZ boundaries causes other problems such as the number of illegal fishing carried out by neighboring countries, especially by Vietnam. Thus, Indonesia took firm action by implementing the Sink The Vessel (STV) Policy to reduce the occurrence of fishing violations in Indonesian jurisdictions. Now negotiations on national borders to resolve border are still being carried out by the second country to strengthen border diplomacy.

Key Notes: EEZ, Border Dispute, Illegal Fishing, STV, Vietnam.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai *Archipelagic* Luasnya meliputi darat dan perairan 8.300.000 km², panjang garis pantai Indonesia ialah 108.000 km². Adapun luas Perairan Laut Indonesia 5,8 juta km²,¹ dengan rincian, luas Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan Indonesia ialah 3.110.000 km², dengan luas Laut Teritorial 290.000 km², Luas Zona Tambahan 270.000 km², luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 3.000.000 km², serta Luas Landas Kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km².²

Luasnya laut Indonesia tentunya menjadi keuntungan maupun tantangan bagi Indonesia, jika pengelolaan perbatasan tidak dilakukan semaksimal mungkin. Penentuan garis pangkal kedua negara inilah yang hingga kini menyebabkan perundingan batas maritim Indonesia dan Vietnam belum menemukan titik terang. Penentuan garis pangkal lurus yang digunakan oleh Vietnam, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, tentu ini dikarenakan garis pangkal lurus yang digunakan tidak sesuai dengan kriteria Vietnam yang bukan negara kepulauan.³ **Gambar 1.1 Peta Permasalahan Zona Tumpang Tindih Indonesia-Vietnam**



Sumber : <https://wri-indonesia.org>

Area tumpang tindih inilah yang sering menyebabkan Indonesia dan Vietnam terlibat kontroversi meski seringkali upaya ketegangan ini diminimalisir oleh kedua negara. Selain itu, adanya kebijakan *Sink The Vessels* yang dikeluarkan Indonesia pada masa kepemimpinan Joko Widodo, akibat maraknya *Illegal Fishing* menjadikan dilema bagi hubungan Indonesia dan Vietnam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dipublikasikannya peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia edisi tahun 2017 pada 14 Juli 2017 memicu polemik, terutama mengenai perubahan nama Laut Natuna oleh Tiongkok⁴. Secara hukum Indonesia hanya berbatasan dengan 10 negara tetangga, diantaranya India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia.

Sementara Tiongkok bukanlah negara tetangga ataupun berbatasan

¹ Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015), H.1

² Biro Perencanaan Dan Informasi, "Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia", Kemenko Kemaritiman Dan Investasi, 10 Agustus 2018, Diakses Di <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>.

Pada 01/11/2019 Pukul 12.19

³ I Made Andi Arsana Dan Helik Susilo, "Analisis Aspek Legal Dan Geospasial Foward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China

Selatan," *Jurnal Geomatika*, (24), (November 2018), H.71

⁴ Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014, Tanggal 14 Maret Tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor Se-06/Pred.Kab/6/1967 Tertanggal 28 Juni 1967, Yang Pada Pokoknya Mengganti Istilah Tjina/China Menjadi Tionghoa/Tionggok, Diakses

<https://nasional.kompas.com/read/2014/03/19/1458446/presiden.sby.ganti.istilah.china.menjadi.tionghoa> 29/12/2020 Pukul 15.15

langsung dengan perairan Indonesia. *Claimant state* Tiongkok atas ‘*nine-dash line*’ yang kini semakin mengganggu yuridiksi nasional Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) khususnya di Perairan Natuna Utara. Natuna merupakan salah satu Pusat Kegiatan Strategi Nasional yakni Kawasan strategis yang diprioritaskan.⁵ Dan merupakan jalur pelayaran internasional dan bagian dari simpul pelayaran dunia (Selat Malaka-Singapura-Filipina). Dilihat dari potensi sumber kekayaan laut, Natuna merupakan wilayah pengelolaan perikanan WPPNRI 711, dengan estimasi potensi sumber daya ikan yang mencapai 1.143.341 ton/tahun.⁶

Selain kaya dengan potensi perikanan, wilayah Natuna juga kaya akan kandungan minyak dan gas. Menurut laporan Kementerian Energi RI, terdapat 16 blok migas, yang terdiri dari 5 blok yang sudah berproduksi dan 11 blok masih dalam tahap eksplorasi. Selain itu, terdapat 11 kontraktor dengan jumlah wilayah kerja perminyakan berjumlah 13 lokasi. Sumur minyak yang ada di wilayah Natuna adalah sebanyak 227 sumur dengan 153 sumur eksplorasi, 34 sumur dalam tahap kajian, dan 40 sumur dalam tahap pembangunan.⁷

Cadangan minyak bumi di Kabupaten Natuna mencapai 298,81 juta barel minyak, sedangkan cadangan gas bumi mencapai 55,3 triliun kaki

kubik. Laporan itu menyatakan dengan estimasi produksi maksimum 1 triliun kaki kubik per tahun, diperkirakan umur cadangan mencapai 50-100 tahun. Sumber daya inilah yang menyebabkan, Natuna sebagai wilayah rawan konflik,

Vietnam merupakan negara tetangga yang secara hukum berbatasan dengan maritime Indonesia. Wilayah perbatasan kedua negara ini terletak di Pulau Condore milik Vietnam dan Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna⁸. Permasalahan klaim tumpang tindih ZEE Indonesia dan Vietnam, berangkat pada satu titik perbedaan makna mengenai rezim kelautan internasional. Diawali dengan perbedaan sudut pandang garis pangkal yang mempengaruhi pengambilan garis ZEE kedua negara.

Garis pangkal lurus yang diklaim oleh Vietnam tentunya menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Sebab, nantinya garis pangkal inilah yang akan berimplikasi pada batas ZEE kedua negara. Perundingan mengenai ZLK Indonesia dan Vietnam sudah berlangsung sejak 5 Juni 1978 hingga pada 26 Juni 2003.⁹ Perundingan tersebut menghasilkan *Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf*

⁵ Anastasia Wiwik Swastiwi, *Arti Penting Atuna Sebagai Jalur Lalu Lintas Perekonomian Di Laut Natuna Utara*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2 Oktober 2018, Diakses Di [Arti Penting Natuna Sebagai Jalur Lalu Lintas Perekonomian Di Laut Natuna Utara - Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau \(Kemdikbud.Go.Id\)](#) Pada 13/03/2021 Pada 18.54

⁶ Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/Kepmen-Kp/2016 Tentang Rencana

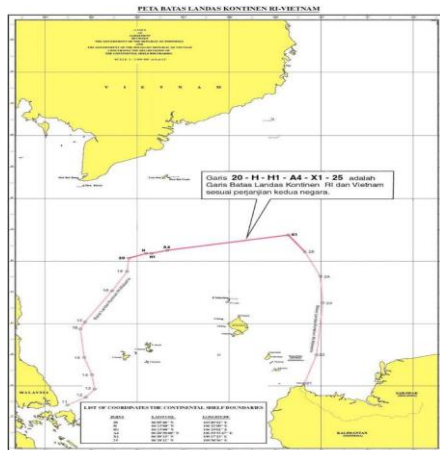
Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711, H.5

⁷ Anugerah Perkasa, “Laut Natuna Sumber Migas Asia”, Cnn News, 23/06.2016 Diakses Di [Laut Natuna Jadi Sumber Migas Asia \(Cnnindonesia.Com\)](#)

⁸ Op.Cit. Anak agung banyu perwita, dkk. “pengantar kajian strategis”. H. 131

⁹ Perbatasan Maritim Indonesia-Vietnam, Diakses Di <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/Migrasi/Peraturan/Perbatasan.pdf>

Boundary, 2003.¹⁰ **Gambar 1.2 Peta Batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam**



Sumber : Dokumen Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen.

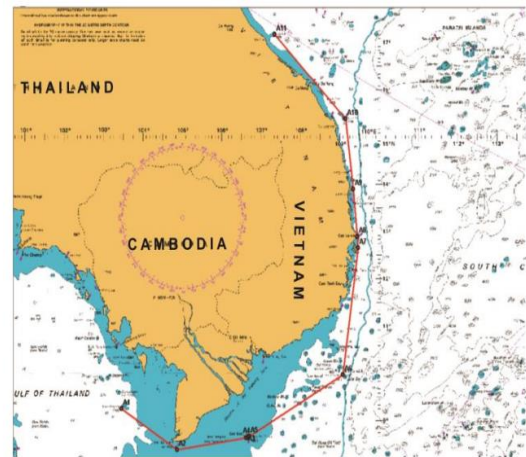
Lamanya jalan perundingan tersebut karna kedua negara memiliki perbedaan pemahaman mengenai masalah teknis dan metode delimitasi garis pangkal kepulauan. Awalnya, Vietnam menginginkan batas ZEE disamakan dengan batas Zona Landasan Kontinen (ZLK) melalui proposal “single line” yang diajukan oleh Vietnam, namun Indonesia menolak. Sebab, rezim kelautan ZEE dan ZLK itu berbeda.

Ditolaknya proposal “single line” Vietnam juga berkaitan dengan garis pangkal yang digunakan oleh Vietnam. Vietnam menggunakan garis pangkal lurus sebagai pengklaiman penetapan batas maritimnya. Garis pangkal lurus inilah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pada Pasal 7 UNCLOS 1982.¹¹

¹⁰ Ni Putu Anggreani, “Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary”, *jurnal hukum internasional*, 6, (3), april 2009. Hal.428

¹¹ Loc. Cit. I Made Andi Arsana Dan Helik Susilo, H.72

Hal ini tidak sesuai dengan kondisi geografis Vietnam sebagai sebuah negara yang memiliki pulau-pulau menyebar ataupun pantai yang menjorok, sebab Vietnam merupakan negara pantai yang melintang dari utara ke selatan dengan sebuah daratan utama dan hanya sebagian kecil pulau di beberapa sisi negara pantai tersebut.¹² **Gambar 1.3 Peta Geografi Dan Titik Pangkap Vietnam**



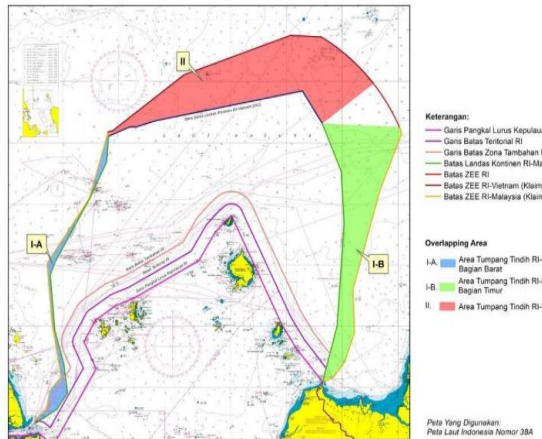
Sumber : I Made Andi Arsana1 Dan Helik Susilo.¹³

Vietnam seharusnya menggunakan garis pangkal normal (*normal baseline*) sebagai garis pangkal negaranya. Dalam hal ini, pantai Vietnam yang menghadap Indonesia tidak memiliki kontur pantai yang bergerigi/”zig-zag”/berpulau, Sehingga penggunaan garis pangkal lurus oleh Vietnam bertentangan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 dan juga menyebabkan adanya area tumpang tindih pada wilayah yang diklaim oleh Indonesia dan Vietnam. **Gambar 1.4 Area Tumpang Tindih/Overlapping Claim ZEE**

¹² Loc.Cit, I Made Andi Arsana Dan Helik Susilo. H.72

¹³ I Made Andi Arsana1 Dan Helik Susilo, “Analisis Aspek Legal Dan Geospasial Forward Position Batas Zee (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China Selatan” *Geomatika* Volume 24 No.2 November 2018

Antara Indonesia Dan Vietnam Di Laut Natuna Utara



Sumber : Shannet Febriyanti, dkk,¹⁴

Klaim inilah yang menjadi dasar acuan wilayah dan yuridiksi laut Indonesia untuk pengelolaan zona tangkap perikanan, termasuk pengelolaan pembrantasan *illegal fishing* ataupun aturan kebijakan kebijakan penenggelaman kapal yang diberlakukan Indonesia. Vietnam juga memiliki klaim sepihak pada batas ZEE-nya yang tumpang tindih terhadap ZEE Indonesia. Sehingga, konflik terbuka pun akan tetap ada selama Indonesia dan Vietnam belum bisa menetapkan perbatasan.

DIPLOMASI PERBATASAN

Untuk mengatasi masalah perbatasan, Indonesia selalu mengupayakan Diplomasi perbatasan (*border diplomacy*). Pada periode 2015-2019, Indonesia telah melaksanakan 79 perundingan batas maritim dengan India, Malaysia, Viet Nam, Palau, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Australia, dan juga sudah melakukan 87 perundingan batas darat dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Papua Nugini.¹⁵

Dalam proses negosiasi, Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI yang diketuai oleh Kementerian Luar Negeri sering kali menemui kendala seperti adanya perbedaan interpretasi rezim hukum internasional yang mengatur tentang batas-batas maritim antar negara, serta permasalahan teknis lainnya. Penyelesaian masalah perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan, hak berdaulat negara, politik, ekonomi, yuridis, teknis serta kepentingan nasional masing-masing negara.

Perundingan penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam telah berlangsung sejak tahun 2010. Berikut adalah pelaksanaan pencapaian perundingan mengenai tumpang tindih klaim ZEE antara Indonesia dan Vietnam.

Perundingan	Tanggal	Tempat
Ke-1	14-21 Mei 2010	Hanoi, Vietnam
Ke-2	21-24 Oktober 2010	Bali, Indonesia
Ke-3	25-28 Juli 2011	Hanoi, Vietnam
Ke-4	3-5 Juli 2012	Jogja, Indonesia
Ke-6	10-12 Maret 2015	Jakarta, Indonesia
Ke-7	15-17 Desember 2015	Hanoi, Vietnam
Ke-8	22-24 Maret 2016	Bali, Indonesia
Ke-9	12 Maret 2018	Bandung, Indonesia
Ke-10	14 April 2018	Vietnam
Ke-11	14-15 September 2018	Vietnam
Ke-12	19-22 Agustus 2019	Surabaya, Indonesia
Ke-13	13-15 November 2019	Hanoi, Vietnam

¹⁴ Shannet Febriyanti, dkk, "Penegakkan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di Zeei" *Jurnal Maritime Indonesia*,

¹⁵ *Rencana strategis kementerian luar negeri tahun 2020-2024*, h.14. diakses di

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0t0bWVudGVyaWFnJTlwTHVhcyUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjAvUmVuc3RyYSUyMETlbWVubHUIAjAyMDIwLTIwMjQucGRm>

Sumber : data dikelola oleh penulis.

Kedua negara mengadakan *informal discussion* pada 12 Oktober 2017, sebagai respon atas meningkatnya kasus pelanggaran *illegal fishing* di wilayah sengketa, untuk membahas penegakkan hukum dilaut dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan menjaga stabilitas keamanan dan keselamatan di perairan perbatasan Indonesia dan Vietnam, serta pembahasan ZEE kedua negara. Selain itu, juga sepakat untuk melakukan penyusunan *Provisional Arrangement* (PA), sebagai pengatur sementara wilayah tumpang tindih untuk menghindari terjadinya insiden bentrokan kapal.

Indonesia juga mengeluarkan pedoman penegakan hukum di wilayah tumpang tindih, melalui Surat Nomor B142/LN00.00/7/2019, keluarnya surat ini karena ada beberapa insiden antara kapal perikanan nelayan negara tetangga dengan otoritas penjaga kelautan Indonesia. Seperti insiden KRI-Tjiptadi 381 milik TNI AL yang bentrok dengan Vietnam Coast Guard di Laut Natuna saat melakukan pengawasan terhadap pelaku *illegal fishing*, pada bulan April tahun 2019.

Pedoman tersebut menjelaskan mengenai kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran kapal asing di wilayah perairan yang tumpang tindih. Apabila kedua negara telah menyepakati *Provisional Arrangement* (PA)/Pengaturan Sementara di wilayah tumpang tindih maka selanjutnya proses hukum akan ditindak lanjuti oleh aparat yang berwenang. Jika kapal asing terbukti melakukan tindakan pidana baik

perikanan maupun non-perikanan di wilayah tumpang tindih/undelimited area maka akan diberlakukan prosedur hukum sesuai ketentuan pedoman tersebut, kecuali terhadap kapal asing *claimant state*.

Dalam hal penegakan hukum kapal negara Indonesia bertemu dengan kapal patroli negara lain, maka diterapkan prinsip saling menahan diri dan berkomunikasi sesuai prosedur yang berlaku.¹⁶

KEBIJAKAN SINK THE VESSEL

Pelaksanaan pelanggaran *illegal fishing* di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sementara Peneggelaman kapal berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4). Dalam mendukung kebijakan STV, pemerintah membentuk Satuan Tugas Khusus Pembrantasan Illegal Fishing/SATGAS 115, yang disahkan dalam Keputusan Presiden No.115 tahun 2015.¹⁷ Satgas 115 merupakan satuan tugas pertama yang dibentuk pada masa kepemimpinan Joko Widodo periode 2014-2019 dalam hal penanggulangan IUU *Fishing* yang terdiri dari KKP, TNI AL, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Polair.¹⁸

Sebanyak 603 kapal ikan telah ditangkap karena melakukan praktik *illegal fishing* sejak periode 2015 hingga September 2019. Sebanyak 234 kapal asal Vietnam, dengan persentase 81% melakukan pelanggaran batas ZEE. Selain Vietnam, ada juga KIA yang berasal dari Malaysia sebanyak 72 kapal, Filipina 58 kapal, dan

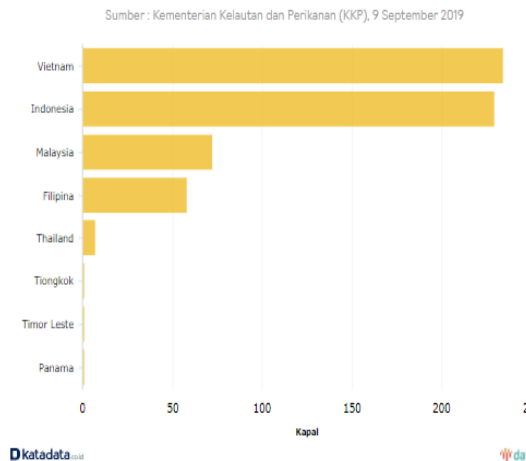
¹⁶ Shannet Febriyanti , Kresno Buntoro , dan Roslin Panjaitan, "Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI," Jurnal Maritim Indonesia, Desember 2020, Volume 8 Nomor 2, h.257

¹⁷ *Ibid*, Rusadi Kantaprawira, dkk. H. 164

¹⁸ KKP NEWS, "Menteri Susi Ingin Pemberantasan Illegal Fishing Tetap Jadi Prioritas Di Masa Pemerintahan Mendatang", 19 Sept 2019, Diakses Di <https://News.Kkp.Go.Id/Index.Php/Menteri-Susi-Ingin-Pemberantasan-Illegal-Fishing-Tetap-Jadi-Prioritas-Di-Masa-Pemerintahan-Mendatang/> Pada 06/06/2021 Pukul 10.30

Thailand 7 kapal. Kemudian disusul oleh kapal Tiongkok, Timor Leste, dan Panama masing-masing sebanyak 1 kapal. Selain KIA, kapal Indonesia yang melakukan penangkapan ilegal juga ditangkap, diantaranya sebanyak 229 kapal.¹⁹ **Gambar 1.5 Kapal Ikan yang Ditangkap KKP Tahun 2015-2019**

Kapal Ikan yang Ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-8 September 2019



Sumber :

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/20/3-tahun-jokowi-jk-tenggelamkan-317-kapal-pencuri-ikan>

Sementara data kapal yang telah ditenggelamkan sejak kebijakan awal penenggelaman kapal dilakukan dibawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti di KKP pada tahun 2014 hingga Oktober 2017 ialah sebanyak 317 kapal telah ditenggelamkan, kemudian bertambah menjadi 363 kapal pada akhir 2017.²⁰

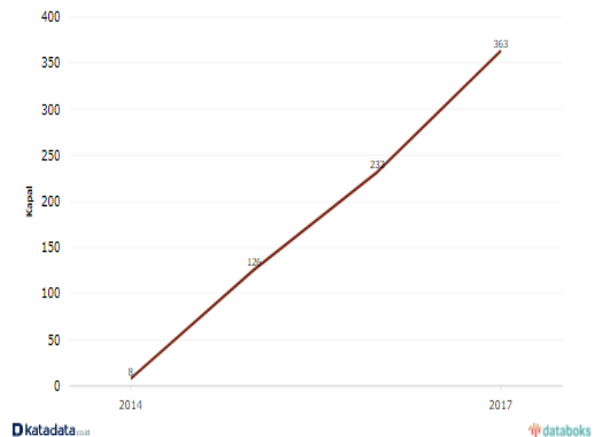
Gambar 1.6 Kapal Pencuri Ikan yang Ditenggelamkan KKP 2014-2017

¹⁹ Databoks. “berapa jumlah kapal ikan yang ditangkap KKP?, 9 september 2019 diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/12/berapa-jumlah-kapal-ikan-yang-ditangkap-kkp>

²⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/20/3-tahun-jokowi-jk-tenggelamkan-317-kapal-pencuri-ikan>

Kapal Pencuri Ikan yang Ditenggelamkan KKP (2014-2017)

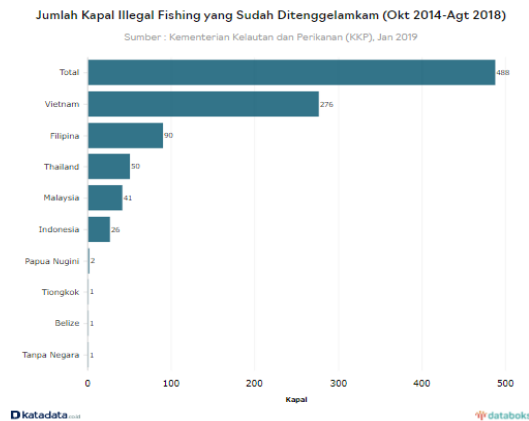
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2017



Sumber : Refleksi 2018 & Outlook 2019 Kementerian Perikanan Dan Kelautan

Sementara data gabungan penenggelaman kapal yang telah dilakukan oleh KKP sejak Oktober 2014 hingga Agustus 2018 ialah sebanyak 488 kapal. Dengan rincian sebagai berikut, Kapal Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 buah kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China dan Belize masing-masing 1 kapal, dan tanpa negara 1 kapal.²¹ **Gambar 1.7 Jumlah Kapal Illegal Fishing yang di Tenggelamkan**

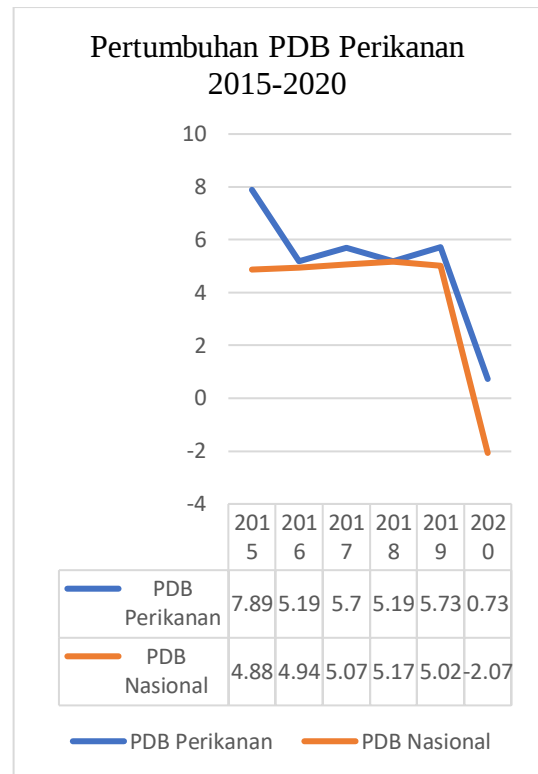
²¹ Refleksi 2018 & Outlook 2019 Kementerian Perikanan Dan Kelautan, hal.32, diakses di [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/Bahan%20RO%20KKP%202018%20\(final\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/Bahan%20RO%20KKP%202018%20(final).pdf) pada 04/06/21 pukul 22.13



Sumber : Refleksi 2018 & Outlook 2019 Kementerian Perikanan Dan Kelautan

Sejak dimulainya kebijakan STV di era kepemimpinan Menteri KKP Susi Pudjiastuti tahun 2015 hingga 2016 telah memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya sektor kelautan dan perikanan.²² Sektor perikanan nasional menunjukkan hasil positif. Pada 2015, (PDB) sektor perikanan membaik dari 7,35 persen di tahun 2014, menjadi 8,37 persen. Produksi perikanan pun meningkat dari 20,40 juta ton menjadi 23,99 juta ton.²³ Sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia yang mencapai 5,73 pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 0,73 akibat pandemic Covid-19. **Gambar 1.8 Data Grafik Pertumbuhan PDB Perikanan 2015-2020**

²² Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia, Volume 12, Nomor 1, *jurnal Spirit Publik*. H.19



Sumber : Laporan Tahunan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, 2020, H.33

Selain berdampak pada pertumbuhan PDB Nasional dan Perikanan, produksi perikanan juga mengalami kenaikan. Dari data KKP, penenggelaman kapal ini berdampak pada semakin meningkatnya tangkapan ikan.

RESPON VIETNAM

Ketegangan antara Indonesia dan Vietnam terkait *illegal fishing*, berawal sejak diberlakukannya kebijakan STV/Penenggelaman Kapal oleh Indonesia. Sehingga, aktifitas pencurian ikan illegal akan tetap berlangsung oleh Vietnam, begitu juga dengan aktifitas pengawasan yang akan tetap dilakukan oleh Indonesia, sehingga tak jarang wilayah yang *overlapping* tadi akan selalu menimbulkan bentrokan.

²³ *Ibid*, Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. H.20

Meski kebijakan ini memicu protes dari berbagai negara tetangga, namun Indonesia tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah respon dari Vietnam, yang memberikan *reminder* terhadap kebijakan nasional Indonesia tersebut bahwa tindakan STV, telah melanggar perjanjian bilateral kontinen 2003-2004. Selain itu pengiriman nota diplomatik antar negara juga sering dilakukan guna menjaga hubungan baik kedua negara.²⁴

HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-VIETNAM

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Vietnam sudah terjalin sebelum 1945. Awalnya hubungan kedua negara berada di tingkat Konsulat Jenderal, kemudian pada 30 Desember 1955 diresmikan menjadi Kedutaan Besar, hingga kini keduanya sudah 65 tahun menjalin hubungan bilateral.²⁵ Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam.²⁶ Hubungan Kerjasama ini sudah terjalin sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Ho

Chi Minh.²⁷ Hubungan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Vietnam juga sudah terjalin sejak 2003, yang kemudian ditingkatkan menjadi hubungan kemitraan strategis pada tahun 2013.²⁸ Vietnam merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang bermitra strategis dengan Indonesia, dikarenakan Vietnam memiliki kepentingan strategis yang sangat besar di Asia Tenggara.

Pada bidang ekonomi, perdagangan kedua negara mengalami peningkatan sejak tahun 2017-2019. Adapun total ekspor Indonesia ke Vietnam tahun 2019 sebesar US \$ 5,7 miliar, dengan komoditi utamanya yakni batubara, kendaraan bermotor, dan besi baja.²⁹ Selain itu, nilai perdagangan bilateral kedua negara juga meningkat yakni 8,4 miliar USD pada tahun 2018 menjadi 9,1 USD pada tahun 2019.³⁰

Adapun kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan ialah dikeluarkannya pernyataan visi bersama antara Kementerian Pertahanan Nasional Republik Indonesia dengan Republik Sosialis

²⁴ Rusadi Kantaprawira, Arry Bainus, dan Indra Kusumawardhana, "The Unbreakable Relations between Indonesia", Vietnam Under "Sink the Vessels" Policy: A Complex Systems Approach", *Journal Of ASEAN Studies*. H 157.

²⁵ Huang Tra, "Presiden Ho Chi Minh dan Presiden Soekarno, persahabatan yang melampaui prinsip-prinsip diplomatik biasa", 9 November 2019, *Vovworld.Vn*. diakses di <https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/presiden-ho-chi-minh-dan-presiden-soekarno-persahabatan-yang-melampaui-prinsipprinsip-diplomatik-biasa-873596.vov> pada 16/06/2021 pukul 14.30ss

²⁶ Mohammad Anthoni, "Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam", *Antara News*, Senin, 21 Agustus 2017, Diakses Di Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam - Antara News Pada 08/03/2021 Pukul 20.23

²⁷ *Strategic Pairing Indonesia Dan Vietnam*, Diakses Di

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/Rj5-20160201-101742-5967.Pdf>

²⁸ Prashanth Parameswaran, "Indonesia-Vietnam Strategic Partnership: The Maritime Domain", *The Diplomat*, 18 April 2018, Diakses Di <https://thediplomat.com/2018/04/Indonesia-Vietnam-Strategic-Partnership-The-Maritime-Domain/> Pada 08/03/2021 Pukul 21.51

²⁹ "Indonesia-Vietnam Economic Relations 2019", Embassy Of The Republic Of Indonesia In Hanoi, H. 16-18, Diakses Di <https://kemlu.go.id/download/L1npdgvybc3nldhmvgtglzdhmvrxrjitiwtwvuds9bbgxjdgvtcy9jbmrvmvzawelmjwawv0bmftjtiwrwnvbm9tawmlmjbszwxhdxglvbnmucgrm> Pada 08/03/2021 Pukul 21.12

³⁰ Nguyen Ha, "Selar-Selar Dalam Hubungan Vietnam-Indonesia Pada Tahun 2019", *Vovworld.Vn*. 2 Januari 2020, diakses di <https://vovworld.vn/id-ID/reportase-hari-sabtu/selarselar-dalam-hubungan-vietnam-indonesia-pada-tahun-2019-815835.vov> pada 16/06/2021 pukul 13.39

Vietnam tentang kegiatan bidang pertahanan menuju 2017-2022.³¹

Menurut data Perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Vietnam yang dikeluarkan oleh GFP (Global Firepower)³² dengan tema “2021 military strength ranking”. Pada tahun 2021 Indonesia berada di peringkat 16 dari 140 negara yang dianalisis oleh GFP dengan power index 0,2684, sedangkan Vietnam berada pada peringkat 24 dengan power index 0.4189.³³

Pada bidang perikanan, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama dalam industri perikanan dengan memperhatikan kualitas perikanan dengan kualitas tinggi untuk dipasarkan di pasar dunia serta pengembangannya dalam sumber daya perikanan.³⁴ Vietnam sebagai negara terbanyak melakukan pelanggaran *illegal fishing* di Indonesia, menyumbang kerugian yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Banyak nelayan Vietnam memasuki wilayah ZEE Indonesia, namun menurut data dari AIS, yang diterangkan oleh Global Fishing Watch, ribuan kapal ikan Vietnam yang tidak memasang AIS/VMS, sehingga keberadaannya pun tidak dapat dilacak menggunakan radar. Namun, keberadaan kapal penangkap ikan Vietnam, dapat dianalisis dari keberadaan kapal pengawas perikanan Vietnam (*Vietnam Coast Guard*) yang

menggunakan AIS, yang melakukan pengawasan terhadap kapal ikan Vietnam yang sering melanggar batas teritorial.³⁵

KESIMPULAN

Ancaman pengklaiman laut yang belum jelas batas dan aturan hukumnya antara Indonesia dan Vietnam, menyebabkan masalah tumpang tindih ini menjadi masalah yang sangat urgensi untuk diselesaikan.

Permasalahan klaim tumpang tindih zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam, terjadi karena adanya perbedaan makna mengenai rezim kelautan internasional yang berawal dari perbedaan sudut pandang garis pangkal yang mempengaruhi pengambilan garis ZEE kedua negara. Sampai saat ini untuk menjaga keamanan kawasan terkait *overlapping claim*, Indonesia dan Vietnam masih melakukan negosiasi terkait batas ZEE kedua negara.

Banyaknya pelanggaran *illegal fishing* yang berasal dari Vietnam menyebabkan banyaknya terjadi bentrokan antara Coast Guard Indonesia dengan Vietnam. Institusi kelautan kedua negara tersebut sering terlibat gesekan terkait permasalahan maritime di kawasan Perairan Natuna. Sehingga berdampak pada berlalutnya perundingan kedua negara, dan aksi sepihak Vietnam yang kurang

³¹

Diakses

<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filena me=VNM-2017-0088.pdf>

³² Global firepower merupakan statistik yang melacak informasi pertahanan dari 140 negara. Untuk menentukan power index gfp menggunakan lebih dari 50 faktor mulai dari kekuatan militer hingga geografi.

³³ “Comparison Of Vietnam And Indonesia Military Strengths (2021)”, Global Fire Power. Diakses di <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?form=form&country1=vietnam&co>

<untry2=indonesia&submit=compare> pada 24/06/2021 pukul 08.52

³⁴ “Prospects Of Indonesia-Vietnam Fisheries Cooperation”, 2019 Review, The Embassy Of The Republic Of Indonesia In Hanoi, H. 9-11,

³⁵ “Analisis Kapal Ikan Asing di Perairan Indonesia Sampai dengan 2014 dan Setelah 2014: Analisis Berdasarkan Data AIS, dan VMS, didukung dengan VIIRS”, Global fishing watch diakses di https://docs.google.com/document/d/1hO_S_GgtOo_k_0UipAroWhNdUxpF9IW6QdpQ5fgl6eY/edit?usp=sharing

menunjukkan itikad kurang bersahabat dengan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015).

Biro Perencanaan Dan Informasi, “*Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia*”, Kemenko Kemaritiman Dan Investasi, 10 Agustus 2018, Diakses Di <https://Maritim.Go.Id/Menko-Maritim-Luncurkan-Data-Rujukan-Wilayah-Kelautan-Indonesia/>.

I Made Andi Arsana Dan Helik Susilo, “Analisis Aspek Legal Dan Geospasial Foward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China Selatan,” *Jurnal Geomatika*, (24), (November 2018),

<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2014/03/19/1458446/Presiden.Sby.Ganti.Istilah.China.Menjadi.Tionghoa>

Anastasia Wiwik Swastiwi, Arti Penting Atuna Sebagai Jalur Lalu Lintas Perekonomian Di Laut Natuna Utara, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2 Oktober 2018, Diakses Di Arti Penting Natuna Sebagai Jalur Lalu Lintas Perekonomian Di Laut Natuna Utara - Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau (Kemdikbud.Go.Id)

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/Kepmen-Kp/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Anugerah Perkasa, “Laut Natuna Sumber Migas Asia”, Cnn News, 23/06.2016 Diakses Di Laut Natuna

Jadi Sumber Migas Asia (Cnnindonesia.Com)

Anggita Rezki Amelia, “Laut Cina Memanas, Kontraktor Migas Diminta Buka Kantor Di Natuna,” *Katadata.Co.Id*, 27 Juni 2016, Diakses Di <https://Katadata.Co.Id/Arnold/Berita/5e9a56ca6c613/Laut-Cina-Memanas-Kontraktor-Migas-Diminta-Bikin-Kantor-Di-Natuna-Pada-07/01/2021>

Anak agung banyu perwita, dkk. “pengantar kajian strategis”.

Perbatasan Maritim Indonesia-Vietnam, Diakses Di <https://Www.Kemhan.Go.Id/Itjen/Wp-Content/Uploads/Migrasi/Peraturan/Perbatasan.Pdf>

Ni Putu Anggreani, “Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary”, *jurnal hukum internasional*, 6, (3), april 2009.

Dokumen Dokumen Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landasan Kontinen.

I Made Andi Arsana1 Dan Helik Susilo, “*Analisis Aspek Legal Dan Geospasial Forward Position Batas Zee (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China Selatan*” *Geomatika* Volume 24 No.2 November 2018

Shannet Febriyanti, dkk, “Penegakkan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di

Zeei” *Jurnal Maritime Indonesia*
Jurnal Maritim Indonesia, Desember
2020, Volume 8 Nomor 2.

*Rencana strategis kementerian luar
negeri tahun 2020-2024*, h.14. diakses
di

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0t1bWVudGVyaWFuJTlIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjAvUmVuc3RyYSUyMETlbWVu bHUlMjAyMDIwLTlIwMjQucGRm>

KKP NEWS, “*Menteri Susi Ingin Pemberantasan Illegal Fishing Tetap Jadi Prioritas Di Masa Pemerintahan Mendatang*”, 19 Sept 2019, Diakses Di <https://News.Kkp.Go.Id/Index.Php/Menteri-Susi-Ingin-Pemberantasan-Illegal-Fishing-Tetap-Jadi-Prioritas-Di-Masa-Pemerintahan-Mendatang/>

Databoks. “berapa jumlah kapal ikan yang ditangkap KKP?”, 9 september 2019 diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/12/berapa-jumlah-kapal-ikan-yang-ditangkap-kkp>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/20/3-tahun-jokowi-jk-tenggelamkan-317-kapal-pencuri-ikan>

Refleksi 2018 & Outlook 2019 Kementerian Perikanan Dan Kelautan, hal.32, diakses di [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/Bahan%20RO%20KKP%202018%20\(final\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/Bahan%20RO%20KKP%202018%20(final).pdf)

Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia, Volume 12, Nomor 1, *jurnal Spirit Publik*.

Rusadi Kantaprawira, Arry Bainus, dan Indra Kusumawardhana, “The Unbreakable Relations between Indonesia”, Vietnam Under “Sink the Vessels” Policy: A Complex Systems Approach”, *Journal Of ASEAN Studies*.

Huong Tra, “Presiden Ho Chi Minh dan Presiden Soekarno, persahabatan yang melampaui prinsip-prinsip diplomatik biasa”, 9 November 2019, *Vovworld.Vn*. diakses di <https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/presiden-ho-chi-minh-dan-presiden-soekarno-persahabatan-yang-melampaui-prinsipprinsip-diplomatik-biasa-873596.vov>

Mohammad Anthoni, “Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam”, *Antara News*, Senin, 21 Agustus 2017, Diakses Di Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam - Antara News.

Strategic Pairing Indonesia Dan Vietnam, Diakses Di <https://Www.Dpr.Go.Id/Dokakd/Dokumen/Rj5-20160201-101742-5967.Pdf> Prashanth Parameswaran, “Indonesia-Vietnam Strategic Partnership:The Maritime Domain”, *The Diplomat*, 18 April 2018, Diakses Di <https://Thediplomat.Com/2018/04/Indonesia-Vietnam-Strategic-Partnership-The-Maritime-Domain/>.

“*Indonesia-Vietnam Economic Relations 2019*”, Embassy Of The Republic Of Indonesia In Hanoi, H. 16-18, Diakses Di <https://Kemlu.Go.Id/Download/L1npdgvc3nldhmvgtglzdhmvrxrjtiwtwvuds9bbgxjdgvtcy9jbmrvmvzawelmjbowawv0bmftjtiwrwnvbm9tawmlmjbszwxhdlg1vbnmucgrm>

Nguyen Ha, “Selar-Selar Dalam Hubungan Vietnam-Indonesia Pada

Tahun 2019”, *Vovworld.Vn*. 2 Januari 2020, diakses di <https://vovworld.vn/id-ID/reportase-hari-sabtu/selarselar-dalam-hubungan-vietnam-indonesia-pada-tahun-2019-815835.vov>

<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=VNM-2017-0088.pdf>

“*Comparison Of Vietnam And Indonesia Military Strengths (2021)*”, Global Fire Power. Diakses di [https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?form=form&country1=viet](https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?form=form&country1=vietnam&country2=indonesia&submit=compare)

[nam&country2=indonesia&submit=compare](https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?form=form&country1=vietnam&country2=indonesia&submit=compare)

“*Prospects Of Indonesia-Vietnam Fisheries Cooperation*”, 2019 Review, The Embassy Of The Republic Of Indonesia In Hanoi, H. 9-11,

“*Analisis Kapal Ikan Asing di Perairan Indonesia Sampai dengan 2014 dan Setelah 2014: Analisis Berdasarkan Data AIS, dan VMS, didukung dengan VIIRS*”, Global fishing watch diakses di https://docs.google.com/document/d/1hO_S_GgtOo_k_0UipAroWhNdUxpF9IW6QdpQ5fgl6eY/edit?usp=sharing